

BAB I

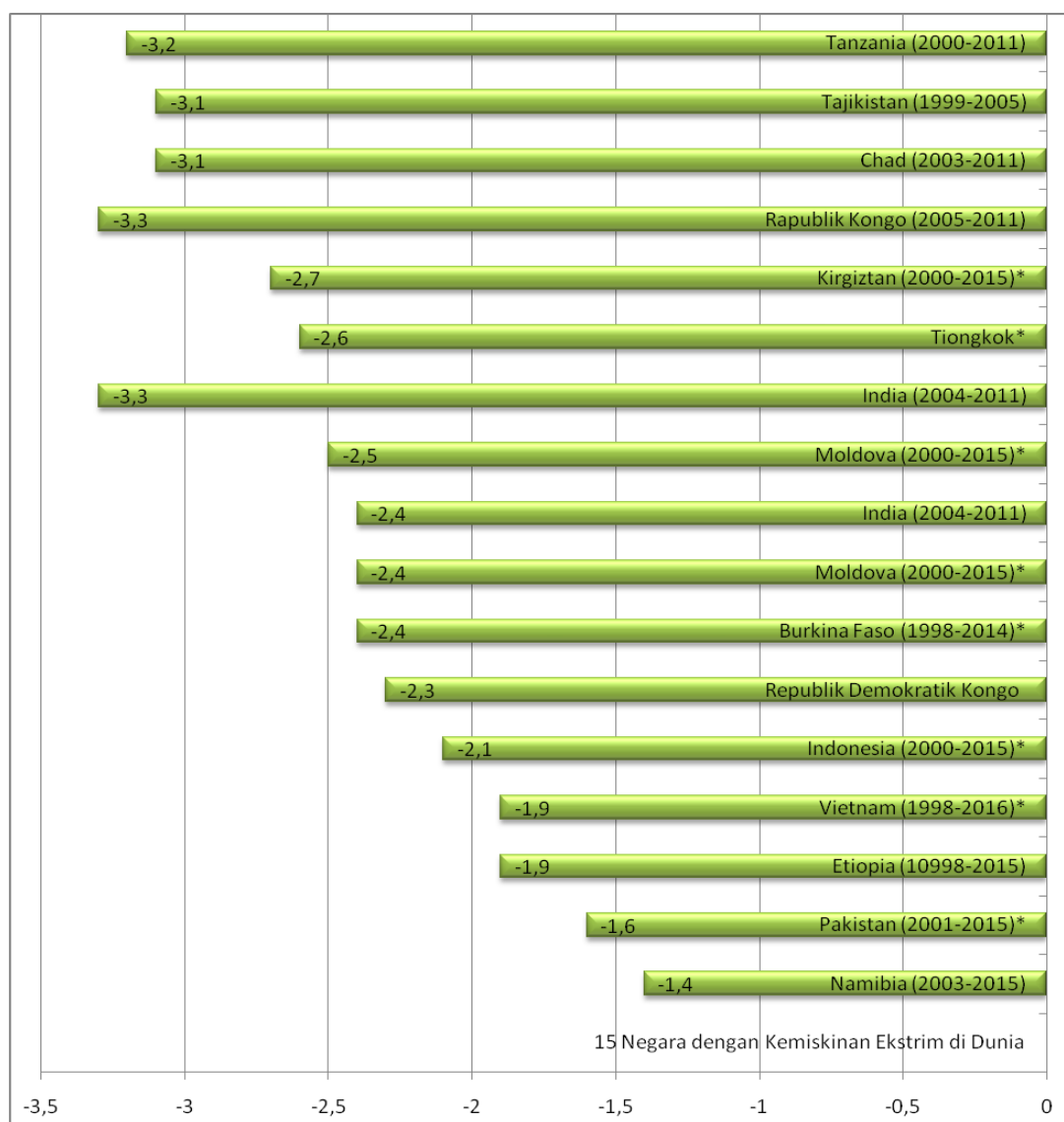
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program pembangunan suatu negara. Pengentasan kemiskinan penting bagi pertumbuhan perekonomian karena memerangi kemiskinan sebagai bentuk langkah mendasar dalam perjalanan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan semua tujuan strategis lainnya. Hal ini kemiskinan memiliki efek negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli penduduk dan alokasi sumber daya.

Pemberantasan kemiskinan ekstrem adalah prioritas penting pembangunan internasional. Pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuknya adalah yang pertama dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB, dan Bank Dunia telah menetapkan tujuan pokok untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 3 persen pada tahun 2030. Pencapaian tujuan ini merupakan tantangan yang berat. Pertumbuhan ekonomi adalah pendorong utama untuk pengurangan kemiskinan, tetapi beberapa penelitian menyimpulkan bahwa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di masa lalu tidak akan cukup untuk memenuhi target. Oleh karena itu, langkah pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada pertumbuhan yang mencerminkan kesejahteraan bersama secara luas dan meningkatkan standar kehidupan kaum miskin. Bukti di mana orang miskin ekstrem tinggal, di sektor mana bekerja, karakteristik demografis, dan perbedaan yang tidak miskin dapat membantu menginformasikan strategi pemerintah yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan Nugroho (2020).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang serius dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut data Word Bank (2019), Indonesia termasuk negara paling progresif dari 15 Negara dengan penurunan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam menurunkan angka kemiskinan. Tercatat sepanjang 2000-2015, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 2,1 persen berada di posisi sebelas setelah Republik Demokratik Kongo.



Gambar : 15 Negara dengan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tertinggi
Sumber : Data Word Bank 2019

Berdasarkan tabel di atas, urutan 15 negara dengan penurunan kemiskina ekstirm tertinggi di dunia, yaitu; Tanzania (2000-2011) sebesar -3,2%, Tajikistan (1999-2015) -3,1%, Chad (2003-2011) -3,1%, Republik Kongo (2005-2011) -2,7, Kirgiztan (2000-2015) -2,6%, Tiongkok -2,5%, India (2004-2011) -2,5%, Moldova (2000-2015) -2,4%, Burkina Faso (1998-2014) -2,4%, Republik Demokratik Kongo -2,3%, Indonesia (2000-2015) -2,1%, Vietnam (1998-2016) -1,9%, Etiopia (1999-2015) -1,9%, Pakistan (2001-2015) -1,8%, dan Namibia (2003-2015) -1,6%.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Menurut BPS pula bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari. Di era sekarang, masalah kemiskinan menjadi lebih kompleks dengan akar permasalahannya menyentuh dimensi ekonomi maupun non-ekonomi.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Timur 2016 s.d 2020

TAHUN	BULAN	
	Maret	Sepetember
2016	4703,30	4638,53
2017	4617,01	4405,27
2018	4332,59	4292,15
2019	4112,25	4056,00
2020	4419,10	4585,97

Sumber : BPS 2020

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah kajian dalam penelitian ini karena satu sisi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2020 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia mencapai 4419,1 juta jiwa. Ini menunjukkan ada ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yang tidak selalu diiringi oleh penurunan kemiskinan secara signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya dikarenakan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, maupun sulitnya akses dalam pendidikan serta pekerjaan (Ellah, 2016).

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara Indonesia karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pengaruh tingkat pendapatan dan konsumsi tetapi juga berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pengeluaran untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya (Fithri : 2017).

Menurut data BPS (2020) pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.585,97 ribu jiwa 11,46 persen, bertambah sebesar 166,9 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 4.419,10 ribu jiwa 11,09 persen.

Persentase penduduk miskin pada September 2020, meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020. Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin meningkat 0,48 persen poin, dari 7,89 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 8,37 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2020 sebesar 14,77 persen, naik menjadi 15,16 persen pada September 2020 (meningkat 0,39 persen poin).

Selama periode Maret - September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 138,0 ribu jiwa dari 1.682,14 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 1.820,13 ribu jiwa pada September 2020. Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 28,9 ribu jiwa (dari 2.736,97 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 2.765,84 ribu jiwa pada September 2020).

Komoditi makanan pada September 2020, memiliki peran 75,00 persen terhadap Garis Kemiskinan, meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang peranannya sebesar 74,97 persen. Beberapa komoditas makanan pada September 2020 yang memberikan kontribusi cukup besar pada Garis Kemiskinan makanan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, cabe rawit, daging ayam ras, gula pasir, tempe, tahu, dan mie instan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin mengalami peningkatan dari 4,11 jiwa pada Maret 2020 menjadi 4,30 jiwa pada September 2020. Berdasarkan data di atas, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menempati angka tertinggi tingkat kemiskinan tahun 2020 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat 4188.52, Jawa Tengah 4119.93, Sumatera barat 1356.72, dan Sumatera Selatan 1091.14 dan provinsi lainnya di Indonesia yang dipengaruhi oleh indeks pendidikan, kesehatan dan pengeluaran.

Faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur yaitu, pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota atau 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 20.374.104 jiwa (BPS: 2020).

Tabel 1.2 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2016 s.d 2020

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Kabupaten Pacitan	12.64	12.62	12.61	12.41	12.19
Kabupaten Ponorogo	13.73	13.72	13.71	13.70	13.69
Kabupaten Trenggalek	12.35	12.25	12.12	12.10	12.09
Kabupaten Tulungagung	13.31	13.15	13.05	13.04	13.03
Kabupaten Blitar	12.46	12.45	12.44	12.43	12.42
Kabupaten Kediri	13.15	12.88	12.87	12.86	12.57
Kabupaten Malang	13.18	13.17	12.87	12.56	12.28
Kabupaten Lumajang	11.81	11.80	11.79	11.78	11.77
Kabupaten Jember	13.42	13.22	13.21	12.79	12.31
Kabupaten Banyuwangi	12.80	12.78	12.69	12.68	12.55
Kabupaten Bondowoso	13.28	13.27	12.95	12.94	12.87
Kabupaten Situbondo	13.15	13.14	13.01	13.00	12.99
Kabupaten Probolinggo	12.35	12.34	12.07	12.06	12.05
Kabupaten Pasuruan	12.41	12.31	12.30	12.05	11.81
Kabupaten Sidoarjo	14.93	14.91	14.75	14.34	14.13
Kabupaten Mojokerto	12.88	12.61	12.53	12.52	12.44
Kabupaten Jombang	13.27	13.00	12.99	12.70	12.69
Kabupaten Nganjuk	12.86	12.85	12.84	12.83	12.82
Kabupaten Madiun	13.16	13.14	13.13	13.12	13.11
Kabupaten Magetan	14.03	14.00	13.73	13.72	13.71
Kabupaten Ngawi	12.70	12.69	12.68	12.67	12.65
Kabupaten Bojonegoro	12.39	12.36	12.35	12.34	12.11
Kabupaten Tuban	12.21	12.20	12.19	12.18	12.17
Kabupaten Lamongan	13.48	13.47	13.46	13.45	13.44
Kabupaten Gresik	13.73	13.72	13.71	13.70	13.69
Kabupaten Bangkalan	11.60	11.59	11.58	11.57	11.56
Kabupaten Sampang	12.37	12.08	11.76	11.38	11.37
Kabupaten Pamekasan	13.64	13.63	13.62	13.61	13.35
Kabupaten Sumenep	13.20	13.19	13.07	12.74	12.73
Kota Kediri	15.26	14.97	14.96	14.95	14.61
Kota Blitar	14.32	14.31	14.02	14.01	14.00
Kota Malang	15.51	15.41	15.40	15.39	15.38
Kota Probolinggo	13.59	13.57	13.56	13.55	13.54
Kota Pasuruan	13.62	13.60	13.59	13.58	13.57
Kota Mojokerto	14.00	13.83	13.82	13.81	13.80
Kota Madiun	14.40	14.39	14.21	14.20	14.19
Kota Surabaya	14.80	14.79	14.78	14.41	13.99
Kota Batu	14.13	14.12	14.04	14.03	13.62
Jawa Timur	13.19	13.16	13.10	13.09	12.98

Sumber: BPS 2020

Taraf pendidikan penduduk diukur dengan berbagai pendekatan. Cara yang cukup sederhana adalah dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama tahun bersekolah penduduk. Cara yang lebih rinci adalah dengan melakukan disagregasi dan pengelompokan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikannya.

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.

Perkembangan indikator pendidikan Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,16 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,19 tahun pada tahun 2020. Capaian indikator harapan lama sekolah semakin baik dan masih di atas rata-rata nasional, meskipun pertumbuhannya melambat. Terlihat pada tahun 2020, HLS hanya tumbuh 0,23 persen, sedangkan di tahun 2019 tumbuh 0,46 persen. HLS sebesar 13,19 menunjukkan penduduk Jawa Timur usia 7 tahun ke atas berharap untuk bersekolah selama 13,19 tahun. Aspek pendidikan Jawa Timur juga terlihat pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka RLS Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sangat penting dalam pengaruh kemiskinan pada usia dini, masyarakat sudah memperkenalkan sekolah, dari tingkat PAUD, SD, SMP, Sampai SMA tujuan tersebut untuk mengembangkan potensi peserta didik agar cakap berilmu serta kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Daerahnya. Menurut Permana (2012) tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seseorang di haruskan memiliki pendidikan setinggi-tingginya agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Saat seseorang bekerja dan mendapatkan gaji yang tinggi maka seseorang harus memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena jika pendidikan dia tinggi maka berdampak pada gaji dan seseorang tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu untuk menentukan kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita di peroleh dari pendapatan pada tahun tertentu di bagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Jika masyarakat memiliki penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi kehidupannya dan menabung untuk biaya di masa depan. Jika pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat itu mencukupi kebutuhan hidupnya

Seseorang dapat meningkatkan sebuah penghasilan melalui pendidikan. Jadi, dalam sebuah proses pendidikan terdapat proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan

manusia yang lebih manusia mengurangi pengangguran yang ada di Jawa Timur. Dengan pendidikan masyarakat akan lebih mudah berkarya serta lebih mudah mencari lowongan pekerjaan dibandingkan dengan orang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Menurut BPS (2021) kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan *people centered development*. Mengingat peran sangat penting kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan *people centered development*, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat.

Pertama, Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain

kesehatan dan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Menurut Gillis (2000) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting. Pertama karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Kedua, karena banyak hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan status sosial di masyarakat akan terangkat sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Program bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi setiap siswa yang secara kontinu diberikan oleh pemerintah diharapkan akan mampu mendongkrak Harapan Lama Sekolah (HLS). Program beasiswa juga dapat diberikan kepada anak-anak petani dan nelayan kurang mampu secara ekonomi sehingga angka *Drop Out* (DO) dapat diturunkan. Pada waktunya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat meningkat.

Pada tahun 2020, indeks pendidikan Jawa Timur mencapai 0,63, kondisi ini meningkat dibanding kondisi tahun 2019 yang sebesar 0,62. Kenaikan secara kontinu ini terjadi dalam lima tahun terakhir. Kendati selama tahun 2020, Jawa Timur diterpa Pandemi Covid-19 yang secara massif mengubah system pendidikan dan pembelajaran dari luring ke daring. Ini menunjukkan Pemerintah Jawa Timur sangat serius untuk meningkatkan pembangunan manusia dari sisi pendidikan. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan capaian di antara kabupaten/kota. Setidaknya terdapat 20 kabupaten/kota yang memiliki indeks pendidikan di bawah level provinsi. Tercatat pula masih ada sebanyak 50 persen wilayah memiliki IPM di bawah level provinsi BPS: (2020).

Aspek pendidikan yang tinggi tentu mampu membangun budaya masyarakat yang sehat sehingga pada saat yang sama memberikan pengaruh positif terhadap Umur Harapan Hidup. Tidak hanya itu, kondisi masyarakat yang rata-rata berpendidikan tinggi akan meningkatkan besarnya peluang kesempatan kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, aspek pendidikan merupakan faktor kedua yang memiliki pengaruh terhadap pendidikan di Jawa Timur.

Kedua, kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan sejumlah hal positif lainnya.

Kesehatan menurut Undang-undang No. 23 tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kerja yang memiliki kesehatan secara fisik dan mental akan lebih produktif sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pada tingkat makro yaitu penduduk, kesehatan yang baik merupakan sebuah masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, dan peningkatan gizi. (Putrizahra, 2014).

Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya

ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, merupakan suatu keharusan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis Jawa Timur, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia.

Berdasarkan data, Umur Harapan Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik. Umur Harapan Hidup (UHH) Jawa Timur, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup tahun 2016 sebesar 70,74 tahun dan meningkat menjadi 71,30 tahun pada tahun 2020. Namun demikian, bila dibandingkan dengan angka UHH Nasional, UHH Jawa Timur masih di bawah UHH Nasional yang mencapai 71,47 tahun pada tahun 2020 (BPS: 2020-2021).

Dilihat dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur, pada tahun 2020 sudah terdapat sebanyak 332 rumah sakit, 1.004 puskesmas, dan puskesmas pembantu 2.269, serta 1.174 poliklinik. Dengan jumlah ini maka pelayanan kesehatan di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik, selain perlunya ditambah alat kesehatan yang modern dan memadai. Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2020, baru tersedia sebanyak 7.907 dokter. Sedangkan jumlah bidan terdapat sebanyak 25.253 orang. Jumlah tenaga kesehatan lainnya seperti perawat sebanyak 55.984 orang. Kondisi kesehatan penduduk Jawa Timur berhubungan erat dengan kondisi sanitasi di lingkungan perumahan tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2020, tercatat bahwa masih ada sebesar

7,82 persen penduduk yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri maupun bersama. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur karena sangat pentingnya sarana ini untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Dengan demikian tinggi rendahnya indeks kesehatan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Ketiga, faktor pengeluaran. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran, Amelia dkk (2015).

Perkembangan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan Jawa Timur sejak 2016 sampai dengan 2020 terus meningkat. Peningkatan ini mencerminkan bahwa tingkat pendapatan penduduk Jawa Timur terus meningkat setiap tahunnya.

Meski terus mengalami peningkatan, capaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, dari 11.739 rupiah menjadi 11.601 rupiah. Penurunan pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Jawa Timur sejak Triwulan III 2020 dan sekaligus menyebabkan ekonomi Jawa Timur berkontraksi cukup dalam.

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya sebesar 17.755 ribu rupiah dan Kota Malang

yang tercatat sebesar 15.732 ribu rupiah. Sedangkan pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan terendah adalah Kabupaten Sampang, yakni sebesar 8.739 ribu rupiah dan Kabupaten Bangkalan sebesar 8.610 ribu rupiah.

Secara teori, kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tecermin dari indeks pengeluaran (*purchasing power parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Indeks ini disajikan dalam bentuk pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan.

Pada tahun 2020 indeks pengeluaran Jawa Timur sebesar 0,75 atau stagnan sebagaimana kondisi di tahun 2019. Kendati demikian, dalam empat tahun terakhir, Indeks pengeluaran Jawa Timur secara kontinu terus meningkat. Dengan demikian, faktor pengeluaran yang terus meningkat dari 2016 sampai dengan 2020 memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGELUARAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?

2. Apakah Kesehatan berpengaruh Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?
3. Apakah pengeluaran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau referensi terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih dalam mengatasi kemiskinan.